

**Judul** : Penunjukan Kapolri, persetujuan DPR amanat reformasi  
**Tanggal** : Minggu, 14 Desember 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Penunjukan Kapolri

## Persetujuan DPR Amanat Reformasi

KOMISI III DPR sepakat menolak ide Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) agar calon Kapolri tidak perlu diseleksi oleh DPR. Karena, pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR adalah amanat reformasi.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhan mengatakan, Pasal 7 ayat (3) TAP MPR Nomor 3/2000 menyebutkan, Polri yang dipimpin oleh Kapolri, diangkat Presiden dengan persetujuan DPR. "Pengusul Kapolri diangkat tanpa persetujuan DPR telah gagal menjelaskan argumentasinya," kata Habiburokhan dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Diketahui, Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Dwiyanto Prihartono mengusulkan agar calon Kapolri tidak perlu diseleksi DPR agar independen. Sebab berdasarkan rujukan fakta beberapa tahun terakhir, posisi kepolisian cenderung tertarik oleh berbagai kekuatan politik, termasuk kekuatan partai.

"Ada bargaining position mereka di sana. Itu tembus sampai ke daerah-daerah, sehingga

sistem komando menjadi terganggu, karena faktor politik lebih mendominasi ketimbang faktor profesionalnya kepolisian," ujar Dwiyanto di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Habiburokhan melanjutkan, bila hak pengawasan dikonotasikan berujung intervensi, hal yang sama juga bisa terjadi jika Polri diawasi institusi lain di luar DPR. Sehingga, tuduhan persetujuan wakil rakyat telah membuka peluang intervensi terhadap kepolisian sehingga menyulitkan Polri menjalankan tugas, adalah tuduhan yang tidak berdasar.

"Ada anggapan DPR terlalu lembek dalam merespons pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Tapi apa jadinya jika persetujuan (DPR) ditiadakan," kata politikus Gerindra ini menekankan.

Habiburokhan menegaskan, DPR adalah lembaga legislatif yang merupakan representasi konstitusional atas rakyat. Sehingga, persetujuan penunjukan Kapolri merupakan bagian dari implementasi tugas DPR mengawasi pemerintahan.



Habiburokhan

Senada, Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menolak wacana penunjukan Kapolri oleh presiden tanpa persetujuan DPR. Gagasan itu sebagai suatu bentuk keabsenan terhadap pemaknaan mendalam tentang konsep negara hukum dan negara demokrasi.

"Mengacu Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, Indonesia adalah Negara Nomokrasi Konstitusional yang menuntut hadirnya kontrol antar cabang kekuasaan," ujar Rudianto dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Rudianto menegaskan, dalam hal pengangkatan pejabat publik strategis, DPR menjadi representasi rakyat yang memberikan legitimasi. Jadi konsekuensi logis dari mandat konstitusi ini adalah penjelmaan makna demokrasi konstitusional, artinya hadirnya mekanisme check and balance.

Rudianto membantah anggapan pengawasan DPR hanyalah ritual politik. Karena fungsi itu merupakan wujud kedaulatan rakyat yang memastikan setiap alat negara mendapat validasi konstitusional. "Prinsip ini sebagai pendulum utama keseimbangan kekuasaan," tegasnya.

Karena itu, ia mengingatkan mekanisme *fit and proper test* di DPR tidak boleh direduksi, apalagi diselewengkan dari makna konstitusionalnya, terlebih dideviasi keluhurannya. Bila ada kekurangan yang harus dibenahi adalah prosesnya dan bukan mandat konstitusinya. "Hal tersebut sebagai bandul utama legitimasi rakyat melalui representasinya di DPR," tegas legislator asal dapil

Sulawesi Selatan (Sulsel) I ini. Sementara, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, polisi tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun ekonomi. Sehingga, akan ada perubahan aturan mengenai pemilihan Kapolri. Di mana, Presiden bisa memilih langsung tanpa harus melalui proses di DPR.

"Jangan sampai ke depan (pemilihan Kapolri) banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kepentingan ekonomi," kata Jimly di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Jimly menegaskan, polisi harus betul-betul menjadi aparatur demi kepentingan rakyat dan harus berada di garda terdepan dalam menjaga hidup yang adil dan damai. Artinya, antara negara dengan masyarakat, bisnis, politik, betul-betul polisi itu menjadi garda terdepan untuk hidup damai, aman, damai, dan adil. "Jadi polisi itu keamanan dan pintu untuk penegak keadilan," tandas eks Ketua MK ini. ■ 71F